

The background of the page is a repeating pattern of the University of Agung Sriwijaya logo. The logo is a circular emblem with a blue border. Inside the circle, there is a central figure, possibly a traditional Indonesian motif, surrounded by the text 'UNIVERSITAS IT AGUNG SRIWIJAYA' and 'SURABAYA' at the bottom. The pattern is arranged in a grid across the entire page.

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan asas gotong royong menjadi visi pemerintah Indonesia saat ini. Visi tersebut diimplementasikan dengan upaya pemerintah dalam membangun tata kelola birokrasi pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. Artinya negara akan selalu hadir di tengah masyarakat untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya yang merupakan nafas reformasi birokrasi.

Visi pemerintah tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk revolusi mental yang diarahkan untuk mengembalikan jati diri birokrasi Indonesia dari birokrasi bermental priyayi menjadi birokrasi yang melayani, diwujudkan dengan perubahan pola pikir, budaya kerja birokrasi dan menata struktur birokrasi pemerintahan yang selama ini kurang lincah merespon perubahan sosial di masyarakat. Gerakan revolusi mental diharapkan dapat mencapai terwujudnya pemerintahan berkelas dunia pada tahun 2025, serta mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kompetitif dan mampu bersaing di kancah negara-negara ASEAN.

Pemerintahan berkelas dunia yang memiliki daya saing memerlukan pondasi perekonomian yang kuat dan maju. Percepatan kemajuan ekonomi Indonesia akan dikembangkan dengan memprioritaskan pembangunan ekonomi sektor maritim, mengingat 70% wilayah Indonesia adalah perairan. Berdasarkan pandangan tersebut, maka dibangunlah sebuah misi mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tekad ini mengandung arti bahwa Indonesia akan menjadi negara yang menjadi pusat kegiatan maritim dunia, baik dalam proses produksi maupun proses distribusi kebutuhan hidup.

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, terdapat lima pilar utama yang menjadi prioritas pembangunan di bidang maritim yaitu : 1) membangun kembali budaya maritim Indonesia; 2) menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus

membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama; 3) memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, *deep seaport*, logistik, industri perkapalan dan pariwisata maritim; 4) melalui diplomasi maritim, mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerjasama di bidang kelautan; dan 5) sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim.

Berdasarkan konsep pembangunan tersebut di atas, berarti Indonesia akan menitik beratkan prioritas pembangunan pada dua sektor yaitu maritim dan birokrasi publik. Khususnya pembangunan bidang maritim mencakup keduanya, baik sektor maritim itu sendiri maupun birokrasi publiknya. Pembangunan maritim meliputi pembangunan pada sektor produksi dan distribusi maritim, diawali dengan melaksanakan reformasi birokrasi dengan membangun birokrasi maritim yang bersih, profesional dan mampu memberikan pelayanan profesional dan berkualitas kepada masyarakat.

Aktivitas produksi dan distribusi maritim meliputi banyak kepentingan dan instansi yang terlibat di dalamnya. Diantara aktivitas maritim yang paling menonjol antara lain kegiatan bidang kelautan dan perikanan, transportasi laut / perhubungan, pertambangan, pariwisata, pertahanan dan keamanan, kepelabuhanan, kesyahbandaran, pemetaan laut, imigrasi, pencarian dan pertolongan, cagar alam, dan keamanan laut. Dari masing-masing instansi yang memiliki tugas dan kewenangan pada bidang maritim tersebut juga terdiri atas unsur-unsur pelaksana dari tingkat pusat hingga daerah yang memiliki kewenangan strategis hingga teknis.

Instansi pemerintah pemangku kepentingan pada bidang kelautan dan perikanan memiliki peran sangat penting dalam pembangunan sektor maritim ini, karena nilai produksi dan distribusi Indonesia dari sektor maritim dapat dikelola di sini. Produksi dan distribusi hasil perikanan merupakan sumber pendapatan negara dan daerah yang sangat besar serta bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai pelaku utama pada sektor produksi ini. Selain itu, nelayan juga merupakan pilar utama dalam mewujudkan pembangunan maritim menuju kesejahteraan masyarakat.

Pelabuhan perikanan merupakan aparatur negara yang membidangi sektor kelautan dan perikanan, mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat maritim. Pelabuhan perikanan harus ikut serta mengambil peran dalam upaya mensukseskan reformasi birokrasi di Indonesia. Implementasi peran kepelabuhanan perikanan adalah dengan melaksanakan gerakan revolusi mental birokrasi kepelabuhanan perikanan yang mencakup 3 langkah *transformative* yaitu : 1) mengubah pola pikir (*mindset*) dari birokrasi priyayi ke birokrasi melayani, dari birokrasi yang berorientasi kepada keluaran (*output*) ke birokrasi yang berorientasi kepada hasil (*outcome*) dan manfaat (*benefit*); 2) mengubah budaya kerja (*culture set*) birokrasi, dari budaya kerja yang lambat, berbelit-belit, kurang kompeten, boros, ego sektor dan koruptif ke budaya kerja yang cepat, sederhana, kompeten, hemat, bekerja lintas sektor dan bersih; dan 3) menata struktur (*management structure*) birokrasi pemerintahan yang selama ini kurang lincah merespon harapan masyarakat, serta arus perubahan sosial, budaya, ekonomi dan politik sebagai dampak globalisasi.

Pelabuhan perikanan merupakan birokrasi pemerintah sebagai sarana prasarana proses produksi dan distribusi hasil ikan laut yang merupakan kebutuhan logistik, sehingga pelabuhan perikanan ini patut menjadi salah satu lembaga prioritas pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan akan menjadi pendorong suksesnya mencapai kesejahteraan bangsa, karena fasilitas ini selain sebagai sarana produksi dan distribusi maritim, pelabuhan perikanan juga berfungsi menyelenggarakan pemerintahan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Dengan terwujudnya pelayanan publik kepelabuhanan perikanan yang profesional dan berkualitas yaitu memberikan pelayanan publik yang memuaskan kepada masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa kepelabuhanan perikanan telah berpartisipasi memberikan kontribusi dalam mencapai visi dan misi reformasi birokrasi yaitu menciptakan birokrasi bersih, kompeten dan melayani, menuju terwujudnya pemerintahan berkelas dunia pada tahun 2025.

Mengingat Indonesia adalah negara maritim dengan wilayah perairan 2/3 bagian dan masih membutuhkan banyak strategi pengelolaan sumber daya laut, khususnya perikanan tangkap, maka

pengelolaan perikanan tangkap di Indonesia perlu mendapat perhatian khususnya pada pembangunan sistem pelayanan publik. Pembangunan pada sistem ini akan memberikan pengaruh positif terhadap meningkatnya kualitas eksplorasi sumber daya perikanan, sehingga memberikan peran yang besar dalam mewujudkan pilar kedua Indonesia sebagai poros maritim dunia yaitu menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Mengingat potensi perikanan tangkap Indonesia sangat berlimpah, karena perairan Indonesia adalah perairan tropis, merupakan pertemuan arus laut dunia yang kaya kandungan plankton, sebagai sumber utama rantai makanan di laut.

Pelabuhan perikanan merupakan lembaga pemerintah penyedia fasilitas bagi kapal-kapal perikanan, sehingga memiliki peran signifikan dalam mendukung operasional penangkapan ikan di laut. Keberadaan pelabuhan perikanan perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya pengembangan produksi dan distribusi hasil perikanan tangkap. Dewasa ini telah banyak dibangun pelabuhan perikanan di Indonesia, dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan kepada kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan Indonesia sehingga kualitas produksi ikan lebih baik, meningkatkan mutu tangkapan, serta meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat nelayan.

Keberadaan pelabuhan perikanan dengan kuantitas yang banyak juga menimbulkan masalah tersendiri bagi pemerintah. Masalah utamanya adalah tentang pengelolaan sesudah pelabuhan perikanan tersebut dibangun. Pengelolaan pelabuhan perikanan meliputi kegiatan pengoperasian, pemeliharaan, rehabilitasi dan pelayanan sarana prasarana pelabuhan perikanan. Jika pengelolaan tidak terlaksana dengan baik maka akan menjadi penghambat dalam upaya mewujudkan fungsi dan peranan pelabuhan perikanan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, bahwa pelabuhan perikanan berperan penting dalam pelaksanaan pengawasan penangkapan dan pengendalian sumber daya ikan serta pengawasan mutu hasil perikanan khususnya perikanan tangkap.

Banyaknya jumlah kapal perikanan yang singgah di sebuah pelabuhan perikanan dan komoditi ikan yang didaratkan menunjukkan tingkat perkembangan dan pertumbuhan pelabuhan perikanan tersebut.

Data ini juga dapat menjadi bahan evaluasi apakah sebuah pelabuhan perikanan telah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas atau belum kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan. Pelayanan publik kepelabuhanan perikanan yang profesional dan berkualitas akan mendatangkan banyak kapal-kapal perikanan untuk singgah dan mendaratkan ikan di pelabuhan tersebut, serta akan memberi dampak positif kepada operasional kepelabuhanan perikanan dan masyarakat sekitarnya. Akhirnya adalah kualitas dan produksi ikan akan bertambah serta kontribusi terhadap pendapatan asli daerah maupun negara meningkat. Muaranya adalah kembali kepada tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap, yang berada di Desa Tambak Rejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur merupakan unit organisasi kepelabuhanan perikanan di bawah koordinator Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur yang sedang dikembangkan oleh pemerintah menuju terwujudnya Kota Minapolitan Sendang Biru. Sebagai kota minapolitan, peran kepelabuhanan perikanan akan menjadi pusat kegiatan operasional daerah dalam mendorong aktivitas kegiatan sehari-hari bagi instansi lain yang ada di wilayahnya. Kegiatan operasional tersebut bukan saja sekedar melayani kapal-kapal perikanan, tetapi juga sebagai motor penggerak dalam aktivitas kegiatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya kelautan seperti ekonomi, transportasi laut, wisata bahari, perbengkelan, industri dan perdagangan maritim serta kegiatan administrator pemerintahan lainnya.

Besarnya tuntutan tugas yang diemban oleh Instalasi Kepelabuhanan Perikanan ini, maka pada bulan Januari 2016 organisasi kepelabuhanan perikanan ini ditingkatkan struktur organisasinya menjadi Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Perikanan Pondokdadap (UPT P2SKP). UPT P2SKP ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 115 tahun 2016.

Berdasarkan peraturan tersebut, Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Perikanan Pondokdadap tidak hanya memiliki tugas dan fungsi di bidang operasional pelabuhan, namun juga melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan dan

pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yang di dalamnya meliputi pengawasan perairan (*patrol*) dan pemantauan usaha pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

Pada tahun 2018 UPT P2SKP dikembangkan lagi menjadi Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai (UPT PPP) di bawah koordinasi Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 74 tahun 2018. UPT PPP bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur di bidang pelayanan teknis pelabuhan perikanan pantai, tata kelola dan pelayanan usaha, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Peningkatan struktur organisasi sebagai Unit Pelaksana Teknis ini diharapkan mampu memberi peluang kepada organisasi kepelabuhanan perikanan pantai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong kinerja organisasi dalam membangun birokrasi kepelabuhanan perikanan untuk menunjang terwujudnya pemerintahan Indonesia berkelas dunia.

Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap mempunyai kontribusi yang besar bagi pembangunan di Jawa Timur, serta menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Kontribusi usaha perikanan tersebut bisa dilihat dari putaran keuangan yang dilaksanakan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sendang Biru yang mencapai Rp. 78.892.120.000,- pada tahun 2018. Pendapatan dari jasa retribusi fasilitas pelabuhan pada tahun 2018 memiliki capaian Rp. 250.094.384,- dari target yang ditetapkan dalam PAD sebesar Rp. 200.000.000,-. Belum lagi kegiatan pada sektor lain seperti penyediaan logistik penangkapan, dukungan bahan bakar, es batu, perbengkelan, suku cadang dan kebutuhan operasional nelayan lainnya. (Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap : 2019).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 08/Men/2012, merupakan rujukan kebijakan dalam pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan di Pondokdadap menuju terwujudnya Kota Minapolitan Sendang Biru. Namun dalam proses implementasi kebijakan tersebut, masih ditemukan beberapa persoalan yang berkaitan dengan otoritas kepelabuhanan, khususnya pelayanan publik kepada masyarakat nelayan pengguna pelayanan barang, pelayanan jasa dan pelayanan administrasi kepelabuhanan. Faktor kesiapan dan kelengkapan sarana prasarana, sistem birokrasi dan budaya kerja,

sumber daya manusia dan mekanisme pelayanan masih sering menjadi persoalan pelayanan publik di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik, Administrator Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap masih mengalami beberapa kendala pada bidang sumber daya organisasi, sarana prasarana, dan otoritas instansi lain yang lebih tinggi di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun kelembagaan yang terlibat. Kebijakan dokumen kapal perikanan merupakan salah satu persoalan para nelayan di Pondokdadap, sehingga banyak ditemukan kapal-kapal perikanan yang belum memenuhi kelengkapan dokumen kapal dan dokumen penangkapan ikan. Hal ini yang menjadi kendala utama dalam pencapaian visi dan misi pembangunan pelabuhan perikanan sebagai unit pelaksana teknis pada tataran operasional kapal perikanan yang beroperasi di wilayahnya.

Fenomena yang terjadi adalah banyaknya kapal-kapal perikanan belum melengkapi dokumen kapal maupun dokumen penangkapan ikan. Dari hasil laporan kegiatan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa dari 434 kapal yang beroperasi di UPT PPP Pondokdadap, hanya 115 kapal yang memiliki dokumen lengkap, artinya hanya sekitar 26,5 % kapal yang beroperasi dengan dokumen lengkap. Data ini juga dapat sebagai indikator bahwa pelayanan administrasi kapal perikanan di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap masih sangat perlu mendapat perhatian agar kapal-kapal yang beroperasi di pelabuhan perikanan ini dapat dilengkapi dokumennya.

Pada sisi lain, administrator kepelabuhanan perikanan juga telah banyak melakukan usaha untuk memberikan pelayanan maksimal agar para pelaku usaha perikanan tangkap di Pondokdadap dapat melengkapi dokumen kapal secara lengkap dan benar. Secara garis besar kendala yang ditemukan adalah persoalan waktu, biaya dan rumitnya birokrasi yang sering menjadi faktor penyebab dalam upaya melengkapi administrasi dokumen kapal perikanan dan dokumen izin penangkapan ikan. Komunikasi dua arah antara pihak administrator dan nelayan yang terputus atau menimbulkan persepsi berbeda juga sering dihadapi dalam upaya mencapai kelengkapan dokumen kapal ini.

Kenyataan tersebut juga menunjukkan bahwa kesadaran hukum terhadap kebijakan pemerintah pada masyarakat pelaku usaha perikanan tangkap di Pondokdadap belum memahami dan mematuhi

aturan yang berlaku. Artinya belum menyadari pentingnya kelengkapan dokumen kapal dan dokumen penangkapan ikan serta pencatatan administrasi ikan hasil tangkapan. Sehingga perlu adanya sosialisasi lebih lanjut perihal kebijakan perikanan oleh administrator kepelabuhanan perikanan dalam rangka mencapai sasaran yang ditentukan, sehingga tujuan pembangunan pelabuhan perikanan di Pondokdadap dapat terwujud sesuai harapan.

Kendala lain adalah kebutuhan logistik melaut yang tersedia di pangkalan selama untuk persiapan menangkap ikan tidak setiap saat tersedia. Dukungan bahan bakar dan es batu sangat tergantung kiriman dari luar daerah Pondokdadap dan jatah yang ditentukan oleh koperasi dan swasta. Daerah Pondokdadap dan sekitarnya masih belum mampu melakukan pengadaan sendiri es batu karena kebutuhan bahan baku yang memenuhi syarat tidak tersedia. Terlebih lagi kekuatan daya listrik dari PLN untuk wilayah Pondokdadap hanya mampu untuk kebutuhan penerangan dan operasional rutin kepelabuhanan perikanan, sehingga untuk kegiatan-kegiatan yang lain perlu pengadaan sumber daya listrik sendiri menggunakan genset.

Kondisi sosial dan budaya yang ada pada masyarakat setempat juga memiliki pengaruh langsung terhadap tuntutan kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Paradigma sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat saat ini mulai bergeser sebagai akibat dari pengaruh media global yang juga seringkali menimbulkan penyimpangan persepsi tata sosial dan aturan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Kondisi masyarakat, yang merupakan fenomena sosial budaya di era kekinian tersebut juga berpengaruh terhadap tingkat kebutuhan pelayanan baik secara kuantitas maupun kualitas. Kaburnya batasan antara kebutuhan-kebutuhan dan keinginan masyarakat dihadapkan kepada ketersediaan sarana prasarana pelayanan publik dan kesiapsiagaan aparatur pemerintah sering menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan pemberian pelayanan di lingkungan pelabuhan perikanan. Perubahan paradigma masyarakat yang demokratis dan merasa ikut terlibat dalam menentukan kebijakan pemerintah telah merubah tata kehidupan masyarakat dengan selalu ingin ikut tampil dalam menentukan aturan hukum yang berlaku baginya.

Di sisi lain, otoritas kepelabuhanan perikanan selalu berupaya untuk dapat memberikan pelayanan publik terbaik yang profesional dan berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat nelayan. Pelayanan

kepelabuhanan perikanan yang profesional dan berkualitas tersebut diharapkan akan menciptakan masyarakat yang lebih tertib hukum terhadap kebijakan kepelabuhanan perikanan. Budaya pelayanan publik yang profesional dan berkualitas juga perlu dijadikan standar operasional dan dilaksanakan secara terintegrasi antar birokrasi pelaksana pelayanan publik terkait yang terlibat dalam kegiatan pelayanan publik di pelabuhan perikanan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera sekaligus menegakkan aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Fenomena pelayanan publik kepelabuhanan perikanan ini merupakan fenomena yang penting untuk dibahas dan dicari solusi untuk pemecahannya khususnya di UPT PPP Pondokdadap karena operasional Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap dinilai berpengaruh langsung terhadap masyarakat maupun pemerintah. Persoalan otoritas kepelabuhanan yang dominan, dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, dan fungsi dalam fungsi perusahaan dengan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dua fungsi Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap tersebut dilaksanakan dalam bentuk memberikan pelayanan publik. Sebagai aparatur pemerintah menyelenggarakan pelayanan kebutuhan administrasi publik pemerintahan dan dalam hal fungsi perusahaan dilaksanakan dengan penyelenggaraan pelayanan kebutuhan barang publik dan jasa publik.

Perkembangan masyarakat postmodern yang semakin kompleks dengan kebutuhan dan tuntutan beraneka ragam, perlu disikapi dan diantisipasi oleh birokrasi kepelabuhanan perikanan, sehingga penyelenggaraan pelayanan publik kepelabuhanan perikanan dapat menjawab tuntutan kebutuhan maupun keinginan masyarakat. Dalam perkembangan dunia global, masyarakat telah mampu mengakses langsung aneka kebutuhannya serta pemasaran hasil produksinya untuk memperoleh persaingan dengan nilai ekonomi dengan resiko yang paling kecil. Produksi ikan dari Pondokdadap saat ini telah berhasil menembus pasar internasional di Amerika dan Eropa sehingga perlu adanya pengawasan intensif dalam menjaga kualitas dan mutu produksi ikan.

Mencermati fenomena di atas dan dinilai permasalahan pelayanan publik di pelabuhan perikanan ini perlu diteliti dan

dipecahkan, maka peneliti melaksanakan penelitian dan mengkaji pelayanan publik di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Peneliti akan meneliti kondisi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh UPT PPP Pondokdadap saat ini, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di pelabuhan perikanan tersebut dipandang dari sudut pelayanan publik kepelabuhanan perikanan serta membangun model pelayanan publik yang paling tepat diaplikasikan di pelabuhan perikanan untuk mencapai pelayanan prima. Faktor pengaruh yang paling nyata ditemukan diantaranya adalah tingkat tersedianya fasilitas sumber daya organisasi dan strategi serta model pelayanan publik berdasar kebijakan kepelabuhanan perikanan. Hasil penelitian ini menganalisis persoalan-persoalan yang ada di pelabuhan perikanan dan menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh serta menemukan solusi sesuai situasi dan kondisi terkini yang dihadapi masyarakat serta meningkatkan kinerja administrator Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap. Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi penyelenggaraan pelayanan publik Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Indonesia serta memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat nelayan sebagai pilar terdepan dalam pemberdayaan hasil produksi perikanan tangkap.

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirinci identifikasi masalah yang ada di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimanakah pelayanan publik di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap?
- 1.2.2 Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelayanan publik di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap belum profesional dan berkualitas?
- 1.2.3 Bagaimanakah model pelayanan publik yang profesional dan berkualitas di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap?

Dari ketiga identifikasi masalah tersebut di atas, maka dapat dikemukakan sebuah rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai

berikut : Bagaimanakah model pelayanan publik yang profesional dan berkualitas di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap untuk mewujudkan pelayanan prima?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk meneliti pelayanan publik yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap.

1.3.2 Untuk menemukan faktor – faktor yang menyebabkan pelayanan publik di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap belum profesional dan berkualitas.

1.3.3 Untuk menemukan model pelayanan publik yang profesional dan berkualitas di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap dalam rangka mewujudkan pelayanan prima.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara akademis hasil penelitian ini akan memberikan manfaat dan nilai tambah yang memiliki nilai teoritis berupa konsep-konsep dalam membangun dan mengembangkan ilmu administrasi publik, khususnya pada aplikasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh birokrasi di Indonesia, yaitu model pelayanan publik yang dapat menjawab tuntutan masyarakat dan situasi saat ini dengan profesional dan berkualitas serta dapat menjadi acuan dalam upaya pemerintah mewujudkan pemerintahan Indonesia yang berkelas dunia pada tahun 2025.

1.4.2 Secara praktis hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi birokrasi pemerintahan di Indonesia, terutama yang berhubungan dengan aktivitas produksi dan distribusi sektor kelautan dan perikanan mengenai bidang pelayanan publik dan lebih khusus lagi bagi pelaksana administrator kepelabuhanan perikanan Indonesia dalam upaya membangun pelayanan prima yang profesional dan berkualitas yang dapat menjawab situasi masyarakat saat ini serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berkelas dunia pada tahun 2025. Penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas tersebut tentunya akan memberi manfaat besar bagi kesejahteraan manusia, masyarakat Indonesia khususnya nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap di sekitar Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur.